

## Research Article

# Analysis of the Implications of the Condominium System in Cyprus: Diplomatic Strategies in Islamic Expansion during the Umayyah Dynasty

**Muhammad Huda Tibbil Qulub**

Ma'had Aly Al-Musyaffa' Kendal

E-mail: [hudathibbil26@gmail.com](mailto:hudathibbil26@gmail.com)

Copyright © 2026 by Authors, Published by Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License: (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : August 13, 2026

Revised : September 7, 2026

Accepted : October 9, 2026

Available online : October 31, 2026

**How to Cite:** Muhammad Huda Tibbil Qulub. (2026). Analysis of the Implications of the Condominium System in Cyprus: Diplomatic Strategies in Islamic Expansion during the Umayyah Dynasty. Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Studi Islam, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.63738/al-hukumah.v3i1.53>

## Abstract

This study examines the dynamics of Islamic expansion to the island of Cyprus during the Umayyad period, which resulted in the establishment of a joint administration between the Islamic Caliphate and the Byzantine Empire, a system known in modern political studies as a condominium. The agreement was ratified by Abd al-Malik on behalf of the Umayyad Caliphate and Justinian II on behalf of the Byzantine Empire. Under this arrangement, Cyprus a center for trade, cultural exchange, and social coexistence between the two. This research employs a qualitative method through library research with a historical approach. Primary sources include the works of Theophanes the Confessor and Ahmad ibn Yahya al-Baladhuri, while secondary sources consist of books, scholarly articles, theses, dissertations, and other relevant academic publications. Data were collected through documentation and literature review and analyzed using historical methods, including heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The findings reveal that the condominium system had political implications in the form of dual authority, social implications through intercommunal coexistence, religious implications marked by the growth of places of worship, and economic implications reflected in the circulation of numismatic artifacts from both powers within the same territory. The study further finds that the decline of this system was caused by internal challenges within the Caliphate, the vulnerability of the agreement to violations, ambiguities in the political compromise underlying the condominium arrangement, and Byzantine military aggression culminating in 965 CE.

**Keywords:** Cyprus, Umayyah Caliphate, Byzantine Empire, Condominium System, Social Coexistence.

# **Analysis of the Implications of the Condominium System in Cyprus: Diplomatic Strategies in Islamic Expansion during the Umayyah Dynasty**

Muhammad Huda Tibbil Qulub

## **Analisis Implikasi Sistem Kondominium di Siprus: Strategi Diplomasi dalam Ekspansi Islam Masa Dinasti Umayyah**

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang dinamika ekspansi Islam ke pulau Siprus yang spesifik terjadi pada masa dinasti umayyah. Menghasilkan perjanjian yang saat ini dunia modern mengenalnya sistem kondominium. Ratifikasi ini disepakati oleh Abd Al Malik sebagai pihak Khalifah Islam dan Justinian II sebagai pihak Bizantium. Siprus kemudian menjadi pusat transit perdagangan antar kedua pihak, bertukarnya budaya kedua komunitas dan koeksistensi sosial. Pendekatan yang peneliti pakai menggunakan penelitian kualitatif berupa library research dengan pendekatan historis. Sumber data yang didapatkan adalah sumber primer antara lain catatan yang ditulis oleh Theopanes the confessor dan Ahmad Ibn Yahya Al-Baladhuri dan sekunder berupa buku, kitab turats, tesis, skripsi dan jurnal. Kemudian metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan berupa buku dan e-book yang selaras dengan penelitian. Sedangkan Teknik analisis data yang peneliti pakai adalah analisis historis yakni heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Temuan mengungkapkan bahwa sistem ini berimplikasi pada segi politik berupa otoritas ganda, sosial berupa koeksistensi sosial, keagamaan berupa bertambahnya tempat ibadah dan ekonomi berupa numismatik yang berkumpul dalam satu pulau dari kedua belah pihak. Serta faktor runtuhnya sistem ini adalah beban internal di kekhalifahan, rawan pelanggaran atas kesepakatan, ketidakjelasan kompromi politik kondominium dan agresi militer oleh Kaisar Bizantium pada tahun 965 M.

**Kata Kunci:** Siprus, Dinasti Umayyah, Bizantium, Kondominium, Koeksistensi Sosial.

### **PENDAHULUAN**

Sejarah peradaban Islam tidak hanya ditandai oleh pencapaian di bidang ilmu pengetahuan, politik, dan budaya, tetapi juga oleh strategi militer dan diplomasi yang unik dalam memperluas wilayah serta menyebarkan agama Islam. Pada masa-masa awal kekhalifahan, Umat Islam dihadapkan pada berbagai model interaksi politik dengan wilayah non-Muslim, baik dalam bentuk penaklukan langsung, perjanjian damai, maupun sistem politik hibrid yang jarang ditemukan dalam sejarah, yaitu kondominium. Dalam kajian hukum dan politik internasional, kondominium dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan bersama atas suatu wilayah yang dikuasai dua kekuatan berbeda. Fenomena ini jarang ditemukan dalam sejarah klasik, namun menariknya, pernah diterapkan dalam konteks ekspansi Islam di Laut Tengah (Mediterrania). Hal ini menegaskan bahwa kekhalifahan Islam sejak awal tidak hanya menggunakan pendekatan militer semata, tetapi juga membuka ruang diplomasi kreatif demi menjaga stabilitas wilayah. Salah satu contoh penting adalah peristiwa penaklukan Siprus (dalam kitab turats: qubrush).

Pada masa Khalifah Usman bin Affan, khususnya ketika Mu'awiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur Syam sebelum naik menjadi khalifah. Mu'awiyah bin Abi Sufyan sekaligus seorang admiral militer pertempuran laut milik Islam. Ekspansi militer pertama ialah Siprus. Pertempuran perdana militer maritim milik Islam, dan menjadi pencapaian tersendiri yakni menaklukan armada laut Romawi di Siprus. Seiring berjalannya waktu hingga berdiri sistem monarki hereditas dalam Daulah Islamiyah tepatnya pada masa Dinasti Umayyah telah berjalan sebuah kesepakatan unik: Siprus ditempatkan di bawah kendali bersama antara kaum Muslimin dan Romawi (Bizantium). Dalam kesepakatan

ini, penduduk Siprus diwajibkan membayar upeti ganda, yaitu sebagian kepada Muslim dan sebagian kepada Romawi, sekaligus tunduk pada pengawasan politik dan hukum dari kedua belah pihak.

Adapun penaklukan Pulau Siprus merupakan ekspedisi laut pertama kali yang dilakukan dan dibentuk perdana oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan atas izin dari Khalifah Utsman bin Affan. Siprus sebenarnya telah menjadi target sejak lama oleh Imperium Islam karena letaknya begitu strategis. Namun pengembaraan tanpa pikiran yang matang akan menghasilkan torehan yang acap kali gagal. Sehingga beberapa tahun sesudahnya, barulah militer maritim Islam melakukan operasi penaklukan dan membuahkan hasil yang sangat menguntungkan bagi perkembangan Islam. Peristiwa bersejarah ini pernah di Clue oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya "Orang-orang dari umatku yang melakukan peperangan di laut seperti para raja yang duduk di atas singgasana." Hadis ini dimaknai kelak bahwasanya suatu saat Umat Islam akan melakukan ekspedisi laut dan meraih kegemilangan. Hal ini terealisasi ketika Mu'awiyah bin Abi Sufyan menjadi Laksamana dalam sebuah pertempuran laut.

Peristiwa ini berlangsung selama kurang lebih 3 abad hingga berlanjut ke Dinasti Abbasiyah. Dalam perjalanan ratifikasinya, sering terjadi tarik ulur terkait ketentuan hukum yang disepakati oleh kedua imperium. Namun pada akhirnya, kondisi selalu kembali pada status quo ante bellum, yakni kedua belah pihak kembali pada perjanjian yang sebelumnya mereka sepakati. Terdapat penelitian yang selaras dengan peneliti angkat yakni tesis milik Dikigoropoulos (1961) dengan judul "CYPRUS 'BEETWIXT GREEKS AND SARACENS' A.D. 647-965", Kemudian penelitian Kedua peneliti dari turki Ozturk (2022) dengan bentuk jurnal berjudul "Cyprus (28-353 AH/648-965 AD): An Island Unable to be Shared Between the Byzantine Empire and the Islamic Caliphate". Perbedaan penelitian ini lebih spesifik ke Siprus dan tidak melebar, kekuasaan Dinasti Umayyad sebagai pelaku sejarah, menentukan Kondominium sebagai subjek implikasi perkembangan dinamika Siprus. Ketiga landasan inilah yang membedakan penelitian dengan kajian pustaka penelitian terdahulu. Menurut peneliti pengenalan Islam di Siprus menjadi wujud kecil bagaimana penyebaran Islam yang seharusnya sekaligus menjadi preseden hukum internasional dalam segi joint sovereignty.

Dalam perspektif dakwah Islam, penyebaran ajaran agama tidak selalu dilakukan melalui ekspansi militer, tetapi juga melalui jalur diplomasi, perdagangan, dan interaksi sosial. Pada implementasinya, penyebaran Islam juga mempunyai prosedur untuk menjamurkan Islam di bumi. Dengan tidak mengesampingkan sifat kemanusiaan dan merawat perdamaian antar individu atau kelompok. Bagian ini justru menjadi organ tubuh berdakwah. Lewat sarana ini, Islam secara tidak langsung mencerminkan visi misinya sendiri. Rahmatan lil alamin. Hal ini dijelaskan seperti dalil yang dinukil dari surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya "Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan

pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk”.) Q.S. An-Nahl: 125).

Atas cuplikan ayat di atas, dalam Ibn Katsir (1999) menyebutkan “Bil-hikmah” maksudnya adalah dengan Al-Qur’an dan sunnah, serta dengan perkataan yang lemah lembut dan hujah yang benar, bukan dengan kekerasan dan emosi. Hal ini memberikan kerangka bahwa selagi islam bisa ditegakkan dengan komunikasi maka tidak berhak invasi atau bahkan islamisasi menggunakan kontak militer. Kondisi semacam ini menimbulkan berbagai implikasi, baik dari sisi politik, sosial, maupun agama. Dari sisi politik, sistem kondominium di Siprus memperlihatkan model kekuasaan bersama yang bersifat kompromistis namun rawan konflik.

Dari sisi sosial, Penduduk Siprus berada dalam ambivalen, karena mereka harus menyeimbangkan loyalitas ganda terhadap dua imperium besar. Sedangkan dari sisi agama, sistem kondominium membuka peluang dakwah Islam bahkan ke ruang yang lebih luas yakni sepanjang pesisir mediterania, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan dalam menjaga identitas serta konsistensi keagamaan masyarakat setempat dan sisi ekonomi dalam tantangan warga Siprus yang harus membayar pajak dua kali lipat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan berfokus pada penelitian dengan judul “Analisis Implikasi Sistem Kondominium Di Siprus: Sebagai Strategi Diplomasi Dalam Ekspansi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah”.

Dengan rumusan masalah mengenai penerapan sistem kondominium di Siprus antara dinasti umayyah-bizantium, analisis implikasi penerapan sistem kondominium di Siprus dan penyebab runtuhnya sistem kondominium di Siprus. Kajian ini penting karena mampu memberikan perspektif historis baru mengenai sistem kondominium Siprus yang diterapkan Dinasti Umayyah sekaligus teoritis mengenai politik diplomasi Islam dalam menghadapi dinamika Siprus dengan Imperium Romawi pada masa Dinasti Umayyah.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang dipakai peneliti dalam mengkaji analisis implikasi sistem kondominium di siprus dalam ekspansi islam pada masa dinasti umayyah adalah penelitian kualitatif berupa library research dengan pendekatan historis (Nazir, 2003). Sumber data yang peneliti dapatkan adalah sumber primer dan sekunder berupa buku, kitab turats, tesis, skripsi dan jurnal. Kemudian metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan berupa buku dan e-book yang selaras dengan penelitian. Sedangkan Teknik analisis data yang peneliti pakai adalah analisis historis yakni heuristik, verifikasi sumber, interpretasi dan historiografi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan Sistem Kondominium pada Masa Dinasti Umayyah di Siprus Kondominium menurut politik adalah istilah untuk kepemilikan bersama (Shared Sovereignty) dalam satu wilayah oleh dua negara (Shaw, 2017). Secara yuridis, kedua negara itu memiliki aturan yang telah disepakati dan berlaku di wilayah kondominium. Hal ini dikemukakan oleh peneliti bernama Oppenheim (1905) dalam buku International Law: A Treatise, kondominium adalah sebidang tanah atau air yang memiliki kepemimpinan atas dua kekuasaan yang wilayah tersebut menjalankan kedaulatan ganda. Definisi tersebut diperkuat oleh peneliti

modern didalam buku hukum internasional yang Ia tulis yakni kondominium merupakan suatu wilayah yang berada di bawah kedaulatan bersama dua atau lebih negara yang memiliki kedudukan setara dalam menjalankan otoritasnya (Shaw, 2017). Terdapat beberapa contoh nyata kondominium. Misalnya adalah pulau Faisans, pulau selebar 2000 meter persegi ini adalah milik negara Spanyol dan Prancis (Arsuaga, 2018). Sebagai bentuk perdamaian atas perang 100 tahun kedua negara. Model administrasi pulau ini tidak diurus bersama, namun bergantian setiap setahun dalam waktu 6 bulan. Kemudian contoh yang kedua adalah pulau Vanuatu yang dahulu disebut dengan New Hebrides (Mosses, 2021). Meskipun telah memiliki pemerintahan sendiri, Vanuatu pra-1980 dimiliki oleh dua negara yakni Inggris dan Prancis. Luas total Vanuatu kira-kira 12.274 kilometer persegi. Penyebab kondominium yang diberlakukan adalah maraknya kolonisasi waktu itu. Sehingga kedua negara menerapkannya untuk meredam peperangan di pulau Vanuatu. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa kondominium umumnya lahir sebagai solusi kompromi atas sengketa wilayah strategis, pola yang secara substantif juga terlihat pada kasus Siprus antara Bizantium dan Umayyah. Sebelum pembahasan yang merujuk kepada berlakunya sistem kondominium di Siprus. Terlebih dahulu kita melihat kajian historis Siprus pra-Islam menginvasi pulau tersebut. Siprus adalah salah satu pulau yang menjadi provinsi Bizantium atau Romawi bagian timur (Cameron, 2012). Pusat Siprus Bizantium waktu itu ialah Salamis. Adapun Salamis (Constantia) berperan sebagai pusat administratif dan keagamaan di Siprus, sebagaimana dijelaskan oleh Jacobs dan Vryonis (1991). Pulau Siprus di dominasi oleh kegiatan pedesaan meskipun sebagai pusat mobilisasi ekonomi Bizantium antar pulau pada masa itu. Namun warga yang berdomisili di Siprus bekerja sebagai petani, nelayan dan berdagang. Tidak ada perindustrian yang berkembang besar.

Pada abad ke 4 Masehi, pulau ini didominasi dengan warga sipil beragama Kristen Ortodoks, hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu tokoh yang familiar, yakni Ehipanius of Salamis (Jacobs & Vryonis, 2016). Seorang biarawan yang pro dengan Kekaisaran Romawi dan menolak ajaran sesat Kristen. Serta menjadi tokoh yang disegani di Salamis. Untuk keadaan Siprus pada masa sebelum abad ke 7. Keadaan ekonomi pulau tersebut lebih dari cukup. Bila wilayah Bizantium tersebut dianalogikan di era modern maka termasuk didalam negara agraris bukan industri apalagi militer. Tidak terdapat data kuantitatif mengenai pendapatan masyarakat Siprus pada masa Bizantium maupun setelah invasi Muslim.

Namun, berdasarkan sumber seperti Al-Baladhuri (1988) dan Hill (1940), dapat disimpulkan bahwa ekonomi Siprus bersifat agraris dengan tingkat produksi yang cukup untuk menopang kehidupan masyarakat. Setelah invasi, meskipun terjadi kerusakan akibat konflik, aktivitas ekonomi tetap berlangsung dengan adanya kewajiban pembayaran upeti kepada kedua kekuatan yang berkuasa. Siprus juga mempunyai posisi strategis. Menurut Hill (1940) Imperium Bizantium menjadikan pulau tersebut sebagai penghubung antara pulau penting lainnya di Mediterania Timur seperti halnya Asia, Yunani, Anatolia dan pulau-pulau lain milik Bizantium. Dibuktikan dengan banyaknya pelabuhan yang ada di pulau Siprus.

Hal ini mengantarkan opini pada Siprus sebagai pusat mobilisasi informasi, perdagangan dan pelayaran. Pada abad ke 7 Masehi, Bizantium mulai bertemu dan menjadi kontak awal militer dengan pasukan Muslim dalam pertempuran Mu'tah (Al-Mubarakfuri, 2008). Peristiwa ini terjadi pada tahun 629 M. Peperangan ini menjadi pemantik dimulainya invasi Islam ke daerah-daerah

kekuasaan milik Bizantium. Salah satu peperangan yang membuka jalan menuju teritorial Bizantium adalah pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebagai panglima perang masa itu yakni Perang Yarmuk (Akram, 2024). Hal ini membuat kontak militer Muslim-Bizantium selanjutnya melebar sampai memperkecil batas wilayah kekuasaan Bizantium di Asia.

Tidak sampai disitu, kontak militer kedua kubu terus berlanjut hingga ke wilayah laut. Apa yang ditulis oleh Dikigoropoulos (1961), bahwa pembuatan armada laut juga dikarenakan Siprus menjadi salah satu tempat sebagai persiapan penyerangan di Alexandria pada tahun 648-649 M. Sebenarnya tertulis didalam jurnal Ozturk (2021). Muslim pada masa itu juga cenderung untuk menjadi militer maritim khususnya Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Hal ini didorong dengan penjelasan oleh Ozturk (2021) 3 faktor alasan mengapa armada laut dibangun: keinginan Muslim mewujudkan hadis Nabi tentang penaklukan Istanbul (Al-Bukhari, 1422 H), ketersediaan tenaga kerja terampil dan bahan baku dan pengalaman perang yang mereka lakukan dengan Bizantium.

Pembangunan armada laut pada masa Usman bin Affan merupakan prasyarat penting bagi ekspansi ke Siprus, karena tanpa kapasitas maritim, kekhalifahan tidak memiliki level politik untuk memaksa Bizantium masuk dalam kompromi kondominium. Beberapa penulis baik dari Kristensentrisme maupun Islamsentrisme menjelaskan dan menangkap kejadian invasi itu, terhitung ini menjadi sumber primer dari catatan sejarah. Berikut penulisan dalam catatan sejarah primer Theophanes the Confessor didalam bukunya Chronographia (Theophanes & Confessor, 1997): "In this year Mauias invaded Cyprus by sea. He had 1,700 ships, and took Constantia and the whole island, which he laid waste." Sebelum ke penjelasan teks, Penyerangan ke Siprus ini atas izin Utsman bin Affan. Awalnya pertempuran laut dilarang oleh Utsman bin Affan karena ikut pada argumentasi Umar bin Khattab namun Kekuasaan Bizantium identik dengan laut.

Hal inilah yang membuat Utsman bin Affan mengizinkannya disertai harus disertai kemantapan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Keberangkatan Mu'awiyah bin Abi Sufyan dengan seluruh keluarganya merupakan bentuk kemantapan hatinya. Adapun landasan perlunya menguasai pulau tersebut, perlu sekali melihat argumen Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Mu'awiyah bin Abi Sufyan berpendapat bahwa selama Bizantium masih menguasai Mediterania timur, selama itulah Bizantium akan berkuasa di Wilayah Asia. Sehingga Peneliti mengindikasikan bahwa pada masa itu, Siprus sangat penting untuk ditaklukan karena sebagai tempat pengawasan strategi pertempuran laut Bizantium. Situasi seperti Bizantium menguasai Siprus akan merugikan pertempuran Kekhalifahan Muslim dipesisir wilayah Asia Timur.

Dalam kondisi tersebut Mu'awiyah bin Abi Sufyan perlu melakukan invasi ke Siprus. Hal ini ditulis oleh berbagai peneliti sejarah seperti Al-Baladhuri (1988), Hitti (1970), Ozturk (2022), dan Kennedy (2007). Kemudian pada tahun 648 M Mu'awiyah bin Abi Sufyan menginvasi Siprus dengan membawa 1.700 kapal dan menguasai Konstantia lalu menghancurkan kota tersebut. Memang dalam penulisan Theophanes terlihat singkat. Tidak ada tambahan literasi setelah itu, kecuali perihal perjanjian yang nantinya akan disepakati dan peneliti menyebutnya kondominium.

Sedang di dalam Futuh al-Buldan karangan Al-Baladhuri (1988) tertulis:

"قَالُوا الْوَاقِدِيُّ وَغَيْرُهُ: غَزَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي الْبَحْرِ غَزْوَةً قُبْرُسِ الْأُولَى، وَلَمْ يَرْكَبِ الْمُسْلِمُونَ بَحْرَ الرُّومِ قَبْلَهَا وَكَانَ مُعَاوِيَةُ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ فِي غَزْوِ الْبَحْرِ فَلَمْ يُأْذِنْ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَأْذِنُهُ فِي

غَزْوَةُ قُبْرُسٍ وَيَعْلَمُهُ قَرَبَهَا وَسَهْوَلَةُ الْأَمْرِ فِيهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ قَدْ شَهِدْتَ مَا رَدَّ عَلَيْكَ عُمَرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حِينَ اسْتَأْمَرْتَهُ فِي غَزْوِ الْبَحْرِ. فَلَمَّا دَخَلْتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ كَتَبَ إِلَيْهِ يُهَوِّنُ عَلَيْهِ رُكُوبُ الْبَحْرِ إِلَى قُبْرُسٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ، فَإِنَّ رَكِبْتَ الْبَحْرَ وَمَعَكَ امْرَأَتُكَ فَأَرْكَبَهُ مَا ذُوْنَا لَكَ وَإِلَّا فَلَا "

Mengulangi dari sejarah diatas namun berbeda sumber. Dalam teks dijelaskan menurut Imam Waqidi dan Ulama' yang lain. bahwasanya pertempuran laut yang dilakukan Mu'awiyah bin Abi Sufyan atas izin Khalifah Utsman bin Affan dilakukan pada tahun 27 H atau kira kira 648 M. setelah terjadi invasi laut Siprus. Penduduk Siprus sepakat untuk membayar upeti kepada Kekhalifahan Muslim dan memberitahu apabila imperium Bizantium datang hendak menyerang kepada Kaum Muslim dan khalifah memberi status aman kepada warga. Kesepakatan tersebut menjadi ambigu karena penduduk setempat melanggarnya. Pihak Siprus, membantu militer romawi menyiapkan kapal tanpa memberi tahu kekhalifahan Muslim. Hal ini terjadi pada tahun 32 H/653 M. Kekuasaan imperium Bizantium dibidang kemaritiman mulai terancam.

Konstan hendak melakukan penyerangan balik namun resistensi yang diupayakan digagalkan oleh militer maritim Muslim yang dipimpin oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan beserta tim barunya. Penolakan resistensi yang dilakukan oleh militer maritim Islam ditulis oleh Hitti (1970) dalam History of the Arabs: "As early as A.H. 34 (655), while Mu'āwiyah was still governor of Syria under 'Uthmān, his fleet under Busr ibn-abi-Artāhin co-operation with the Egyptian fleet under 'Abdullāh ibnabi-Sarh met the Greek navy led by the Emperor Constans II, son of Heraclius, at Phoenix (modern Finike) on the Lycian coast and scored the first great naval victory of Islam. This maritime engagement is referred to in Arabic chronicles as dhu(or dhat) -al-Şawāri (that of the masts)".

Hitti (1970) berlandaskan pada Al-Thabari, menulis kejadian tersebut berlangsung pada tahun 655 M. Dimana gubernur suriah yakni Muawiyah melakukan unresistensi. Militer maritim Islam berhasil mendominasi Siprus meskipun Bizantium melakukan serangan balasan. Resistensi coba dilakukan oleh Konstan saudara Heraklius, namun upaya tersebut tidak mampu membuat maritim Islam keluar dari teritorial laut Bizantium yang pada akhirnya Islam memperoleh kemenangan dan Muslim era tersebut menyebutnya Dhu al-Shawari (pertempuran tiang kapal). Peristiwa tarik ulur kekuasaan tersebut berlangsung beberapa dekade. Baik Dinasti Umayyah maupun Imperium Bizantium mereka sama-sama mempunyai indikasi ancaman. Selain itu, pada dekade tersebut. Bizantium mengalami masalah internal. Pemberontakan terjadi didalam kekaisaran. Menimbulkan kekuasaan Konstan II runtuh dalam pemberontakan. Sedang Mu'awiyah bin Abi Sufyan meninggal dan digantikan putranya.

Ini adalah pertama kali kekhalifahan digantikan dengan sistem monarkiherediter atau kerajaan turun menurun. Karena ini adalah konflik yang dapat menguras ekonomi kedua kubu, menambah statistik korban perang, menambahkan jumlah anggaran produksi pertempuran. Opini-opini tersebut mengarah pada kerugian ditambah dengan jauhnya jarak dari pusat administrasi kedua imperium. Dari Tahun 649 M hingga 688 M kedua dinasti besar ini

merasakan impact konflik Siprus menambah kerugian yang signifikan. Bagi mereka, lebih baik memilih solusi yang tepat dan efektif untuk menyudahi rasa keterancaman di Mediterania bagian timur ini. Masuklah pada masa diplomasi. Ditemukan dalam buku *The Chronicle of Theophanes Confessor* (Theophanes & Confessor, 1997).

Bahwa pada tahun 683 M Abdul Malik bin Marwan sebelum melakukan perdamaian di Siprus juga melakukan kesepakatan damai di Lebanon dan Suriah dengan mengirim diplomat ke Konstantinus disertai dengan membayar 365.000 keping emas, 365 budak, dan 365 kuda sebagai tanda damai. Kemudian ketika Bizantium dipimpin oleh Justinian, diplomasi bertambah Justinian mengirim duta bernama Magistrianus Paulus sebagai perwakilan dari Bizantium datang ke Siprus dan bertemu dengan diplomat Abdul Malik bin Marwan kemudian meratifikasi perjanjian sebagai berikut:

1. Kaisar harus menarik Pasukan Mardaites (Tim khusus Bizantium) dari Lebanon karena pasukan tersebut menimbulkan ketidakstabilan wilayah.
2. Sebagai gantinya orang Bizantium setiap hari mendapat 1.000 keping emas, seekor kuda, dan seorang budak.
3. Jizyah Siprus, Armenia dan Iberia dibagi secara merata antara kedua imperium.

Lalu kesepakatan tersebut terdapat jaminan tertulis dan disaksikan oleh kedua pihak imperium. Dalam hal militer, Siprus bersikap netral, tidak membantu Bizantium maupun pihak lain ketika terjadi peperangan. Selain itu, penduduk Siprus memberikan izin kepada kaum Muslim untuk melintasi wilayahnya dan menjadikan pulau tersebut sebagai jalur pergerakan dan perdagangan menuju wilayah Bizantium. Meskipun sumber-sumber Islam seperti Al-Baladhuri (1988) dalam *Futuh al-Buldan* dan Hitti (1970) dalam *History of the Arabs* menjelaskan invasi dan konflik antara dunia Islam dan Bizantium, keduanya tidak secara rinci membahas perjanjian antara Bizantium dan Dinasti Umayyah terkait Siprus.

Informasi mengenai kesepakatan tersebut lebih banyak ditemukan dalam sumber Bizantium seperti Theophanes (Theophanes & Confessor, 1997). Berdasarkan keseluruhan dinamika kontak Islam-Bizantium yang terjadi di Siprus pada abad ke-7 M, dapat disimpulkan bahwa pola hubungan antara Kekaisaran Bizantium dan Dinasti Umayyah menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan konsep kondominium dalam kajian hukum internasional. Hal ini tampak dari adanya pembagian otoritas yang tidak bersifat absolut oleh salah satu pihak, melainkan dijalankan secara bersamaan dalam bentuk kedaulatan terbatas.

Perjanjian yang dicatat oleh Theophanes the Confessor (Theophanes & Confessor, 1997) memperlihatkan bahwa wilayah Siprus tidak sepenuhnya berada di bawah dominasi Bizantium maupun kekhalifahan Islam, melainkan menjadi wilayah yang dikelola melalui kesepakatan bersama. Pembagian hasil pajak dari wilayah seperti Siprus, Armenia, dan Iberia, serta kesepakatan mengenai netralitas militer, menunjukkan adanya mekanisme kontrol bersama yang menjadi ciri utama dari sistem kondominium. Selain itu, kewajiban masyarakat Siprus untuk tetap membayar pajak kepada kedua kekuatan serta larangan untuk berpihak dalam konflik militer mempertegas posisi pulau

tersebut sebagai wilayah buffer (penyangga) yang berada di antara dua kekuatan besar.

Dalam konteks ini, Siprus tidak hanya menjadi objek perebutan, tetapi juga menjadi ruang kompromi geopolitik yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian, meskipun istilah “kondominium” tidak digunakan secara langsung dalam sumber-sumber klasik seperti Futuh al-Buldan karya Al-Baladhuri (1988) maupun dalam karya modern seperti History of the Arabs oleh Hitti (1970), praktik yang terjadi di Siprus pada masa Dinasti Umayyad secara substantif mencerminkan konsep tersebut. Oleh karena itu, penerapan sistem kondominium di Siprus dapat dipahami sebagai hasil dari kompromi politik antara dua kekuatan besar yang berupaya meminimalkan konflik sekaligus mempertahankan kepentingan strategis masing-masing di kawasan Mediterania Timur.

### **Implikasi dari Penerapan Sistem Kondominium di Siprus dalam Ekspansi Islam**

Sebelum membahas impact yang timbul dari penerapan sistem kondominium. Terlebih dahulu Peneliti mengulas Arabisasi. Lewat skripsi Ashara (2021) yang memaparkan Arabisasi Dinasti Umayyad. History Siprus sangat berkaitan dengan peristiwa Arabisasi pada masa itu. Kedua momen yakni invasi ke Siprus dan Arabisasi Umayyad menjadi kolerasi yang saling berkesinambungan. Program yang dibuat oleh Dinasti Umayyad pada masa ekspansi juga berimplikasi pada aspek-aspek di Siprus. Seperti aspek politik, sosial, keagamaan dan ekonomi. Kata Arabisasi sendiri berasal dari Bahasa Arab masdar عَرَّبَ atau تعريب yakni menyerap kata dari istilah asing ke Bahasa Arab dalam perspektif Arab (Amrulloh, 2017). Sedang Arabisasi dalam segi makna adalah masuknya unsur-unsur istilah asing ke dalam Bahasa Arab yang menimbulkan istilah bahasa baru (Amrulloh, 2017) sedang Hawting (2000) menyebutkan bahwa kata Arabisasi adalah bahasa masyarakat Arab yang masuk kedaerah tertentu.

Hal ini diperkuat oleh Ashara (2021) yang menyebut bahasa dengan kata yang lebih majemuk yakni budaya. Ada 3 hal Arabisasi yang menjadi program Dinasti Umayyad: menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan, mencetak mata uang baru untuk seluruh wilayah dinasti, pembaharuan dalam tulisan Arab guna penyelarasan cara baca (Ashara, 2021). Dalam proses pergerakan Arabisasi, seorang khalifah dibantu Amir (Gubernur) atas wilayah kekuasaan yang khalifah amanahkan. Tugasnya selain program Arabisasi adalah pemasukan jizyah (Pajak), distribusi gaji tentara, menjaga ketertiban, mempertahankan perbatasan, pengorganisasian, memajukan penaklukan hingga menjadi imam sholat. Dibangunnya pabrik pembuatan mata uang dan penyeragaman bahasa dalam bentuk data, arsip dan komunikasi pemerintah adalah manifestasi program Arabisasi pada masa Dinasti Umayyad (Ashara, 2021).

Hal ini dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan keturunannya yakni Walid bin Abdul Malik sebagai bentuk koordinasi pemerintah kepada wilayah kekuasaannya. Contoh konkret proses Arabisasi adalah bergantinya Bahasa Persia dalam administrasi wilayah Persia ke Bahasa Arab seperti daerah

Iran, Armenia, Syam dan wilayah yang lain. Kemudian tentang mata uang koin Arab yang lambat laun berganti menyingkirkan koin Sasaniyah dan Bizantium. Dengan demikian, proses Arabisasi pada masa Dinasti Umayyah berjalan dengan signifikan di wilayah-wilayah regional Dinasti Umayyah. Hal ini mengarahkan opini pada perspektif bahwa ekspansi pada masa Umayyah, bukan hanya melakukan perluasan dalam segi militer saja. Namun juga bertautan dengan segi linguistik, ekonomi, politik dan ilmu.

Dengan demikian, pembahasan Arabisasi diperlukan sebagai landasan komparatif untuk menunjukkan bahwa Siprus, akibat status kondominiumnya, mengalami pola integrasi yang berbeda dan lebih terbatas dibandingkan wilayah Umayyah lainnya. Manuver ekspansi dan invasi di atas selain di Siprus, yang dilakukan pada masa Dinasti Umayyah bergerak secara signifikan. Namun terdapat beberapa provinsi yang perlu dikaji secara mendalam seperti Siprus. Daerah ini memiliki sistem kondominium yang mengikat Kekaisaran Bizantium dan Kekhalifahan Islam pada satu ruang politik.

Dalam hal ini, tentu mempunyai wewenang yang terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan otoritas dalam dua pihak. Aturan kekhalifahan tidak bisa secara penuh mengatur administrasi yang dalam skala regional Dinasti Umayyah tidak berwenang sepenuhnya. Pada sub bab pertama telah dijelaskan bahwa pada Dinasti Umayyah juga melakukan diplomasi dalam ekspansi. Theophanes and Confessor (1997) didalam *Chrognographia*-nya menjelaskan Siprus juga merupakan bagian yang menjadi wilayah negosiasi antara Bizantium dan Umayyah. Mewujud dalam Sistem Kondominium berikut akan dipaparkan implikasi yang kemudian muncul di Siprus berkat alat negosiasi. Baik dalam segi politik, sosial, keagamaan dan ekonomi.

### **Implikasi Politik**

Setelah Suriah, Palestina dan Mesir dikuasai Pasukan Muslim. Bizantium melakukan kontak militer dengan Dinasti Umayyah di Siprus. Selang beberapa dekade munculah perjanjian damai di pulau tersebut. Sistem kondominium de facto telah diterapkan. Sistem Kondominium di Siprus adalah kesepakatan yang disetujui oleh pihak Bizantium dan Dinasti Umayyah. Yang berisi tentang netralitas militer di daerah Siprus, pajak yang dibagi 2, perjanjian damai kedua imperium. Ditemukan peneliti sejarah primer seperti Theophanes and Confessor (1997) dan Al-Baladhuri (1988) mengatakan kedua imperium melakukan perjanjian. Hal ini menjadi salah satu wujud dampak politik ekspansi Islam yang berpotensi besar di analisa. Sebab batas otoritas kedua birokrasi tidak mampu berwenang penuh terhadap Siprus.

Di dalam kitab Al-Baladhuri (1988) terdapat kesepakatan antara Dinasti Umayyah dan penduduk Siprus bahwa rakyat yang berdomisili disana dilarang membantu Imperium Bizantium dalam hal resistensi atau penyerangan balik. Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya pembatasan otoritas masing-masing kekuatan, karena tidak ada pihak yang memiliki kontrol absolut atas administrasi wilayah Siprus. Kekuasaan Islam di sini tidak berbentuk dominasi, tetapi kompromi politik dengan kekuatan Bizantium. Secara Fiqh ini adalah salah satu gambaran dari Aqd as-Sulh (akad perdamaian). Arnold (sebagaimana dikutip dalam Rif'at, 2014) juga menggambarkan bentuk invasi Islam bukan

sekedar Islamisasi namun juga didasari oleh kedamaian satu sama lain. Ia menganggap bahwa pemahaman terkait Islam disebarkan melalui kekerasan merupakan bentuk pemahaman yang salah. Namun, Penduduk Siprus sering melakukan pelanggaran terhadap perjanjian-nya dengan Dinasti Umayyad.

Dikigoropoulos (1961) beramsusi bahwa penyebab dari pemberontakan itu adalah tidak lain karena penduduk Siprus masih mempunyai ikatan historis dengan Imperium Bizantium karena wilayah tersebut sudah dalam kekuasaan Bizantium selama kurang lebih tiga abad lamanya. Hal ini tidak seperti di Suriah yang mempunyai kredibilitas kesepakatan yang stabil. meskipun penduduk berbeda agama namun tetap pada perjanjian sesuai kesepakatan Kristen Suriah dan Dinasti Umayyad. Di dalam banyak catatan sejarah seperti Dikigoropoulos (1961), Al-Baladhuri (1988), dan Theophanes and Confessor (1997) menjelaskan bahwa kesepakatan selama beberapa tahun kemudian diwarnai dengan tarik-ulur perjanjian, seperti didalam kitab Futuh al-Buldan yang menjelaskan argumen-argumen Ulama' tentang pantas atau tidaknya penduduk Siprus di lindungi. Juga pernah dilakukan oleh Justinian II memindahkan penduduk lokal ke Helenspot atau dari segi geografi hari ini adalah sebuah pulau di Turkey bernama Dardanella. Perpindahan ini dilatarbelakangi oleh ambisi Justinian II terhadap pengumpulan pajak yang tidak ingin di bagi 2. Sebagaimana dikutip dari Hill (1940).

Sistem kondominium dan dampak politik ini, serta peristiwa pada fase diberlakukan menimbulkan indikasi tentang engganya berbagi otoritas dalam segi finansial atau jizyah Imperium Bizantium terhadap kerja sama politik dengan kekhalifahan Islam. Untuk itu Shared sovereignty yang coba dibangun oleh kedua imperium dalam sistem kondominium tidak berjalan karena salah satu dari yang disepakati keluar dari ratifikasi.

### **Implikasi Sosial**

Sistem kondominium tidak hanya berimplikasi pada aspek politik saja. Semula sebelum invasi Islam ke Siprus, wilayah tersebut selalu berdampingan dengan Imperium Bizantium. Penduduk mempunyai implikasi dalam aspek sosial sebagai berikut: koeksistensi dua budaya, administrasi, tranformasi sosial non total. Kemudian juga Keberadaan St. Willibald yang tercatat dalam Hodoeporicon menunjukkan bahwa Siprus pada abad ke-8 M tetap menjadi jalur penting pelayaran Mediterania (Burkiewicz, 2021). Dalam catatan tersebut, Willibald disebut singgah di Siprus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun berada dalam pengaruh sistem kondominium antara Dinasti Umayyad dan Kekaisaran Bizantium, Siprus tetap memiliki keterbukaan mobilitas lintas wilayah.

Dalam teks juga menyebutkan bahwa St. Willibald melihat penduduk Siprus terdiri dari orang-orang Greeks (Romawi) dan Saracens (Arab). Momen seperti inilah yang menjadi koeksistensi sosial Siprus. Hal lain diantaranya adalah bangunan yang di namai Masjid Bayraktar dan beberapa benteng khas kedua imperium. Implikasi yang timbul adalah memperkaya kebudayaan sosial di Siprus karena kontak komunikasi dengan penduduk asing misalya Arab atau Bizantium setiap hari dan menjadi tempat berlangsung-nya distributor maritim benua Mediterania bagian timur. Maka berdasar pada keterangan yang ada,

akulturasi banyak terjadi di Siprus.

### **Implikasi Keagamaan**

Selain Aspek Politik dan sosial. Aspek keagamaan juga perlu di bahas. Di karenakan penduduk Siprus di ketahui mempunyai agama asal yakni Kristen Ortodoks. Seperti yang ada dalam kutipan Hill (1940) yang menyebutkan seorang Uskup daerah Tremithus. Yang jasadnya dipindahkan dari Konstantia (Siprus) menuju Konstantinopel ketika perjanjian 688 M. Didukung dengan adanya tokoh Ehipanius of Salamis yang hidup pada abad-abad sebelum islam datang (Jacobs & Vryonis, 2016). Hal ini menguatkan bahwa Siprus era pra Invasi Islam Adalah pulau yang penduduknya beragama Kristen Ortodoks. Penaukitan terjadi dengan ditulisnya histori oleh Dikigoropoulos (1961). Dengan catatan historis Siprus adalah salah satu pulau yang sudah mapan dalam segi keagamaan.

Namun, kesenjangan terjadi pada abad ke tujuh akhir. Ketika invasi Islam bergulir dan menguasai titik-titik vital di Pulau Siprus. Administrasi ganda di berlakukan oleh Imperium Bizantium dan Kekhalifahan Islam. Aspek keagamaan yang dahulu dikuasai penuh oleh Imperium Bizantium. Kini harus terbagi menjadi Kristen Ortodoks dan Muslim Arab. Tidak seperti kekuasaan yang lain seperti Mesir, Suriah dan daerah-daerah non-Islam yang mengalami penaklukan. Proses Islamisasi dilakukan secara bertahap. Bahkan di daerah Kristen pun seperti Suriah proses Islamisasi tidak naik signifikan karena sebagai bentuk penghormatan kekhalifahan terhadap negara taklukan-nya dalam segi beragama, sehingga Siprus mempunyai tingkat toleransi beragama yang tinggi. Dibuktikan dengan adanya bangunan dalam menjalankan ibadah ditempat suci masing-masing.

### **Implikasi Ekonomi**

Diambil dari penelitian berjudul Cyprus Between Late Antiquity and the Early Middle Ages (ca. 600–800): An Island in Transition yang ditekuni Zavagno (2017), status kondominium menjadikan Siprus tidak sepenuhnya dikuasai oleh salah satu pihak, melainkan berada di bawah pengawasan bersama antara Arab dan Bizantium. Kondisi ini memungkinkan Siprus tetap berfungsi sebagai pusat perdagangan maritim di Mediterania Timur karena kedua kekuatan berkepentingan menjaga kestabilan ekonomi pulau tersebut. Sistem tersebut juga berdampak pada pola Jizyah. Penduduk Siprus diwajibkan membayar upeti kepada kedua kekuasaan, yaitu Dinasti Umayyah dan Imperium Bizantium.

Walaupun kondisi ini meningkatkan beban ekonomi masyarakat, kebijakan tersebut justru mencegah kerusakan besar akibat perang berkepanjangan sehingga kegiatan agraria, pelayaran, dan perdagangan tetap berjalan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya dua koin milik Bizantium dan Dinasti Umayyah yang pada indikasi-nya mengarah pada masa yang sama, karena koin tersebut sezaman pada kekuasaan dari Justinian II dan Abdul Malik bin Marwan bertuliskan: *أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له* Ini menjadi indikasi salah satu faktor yang menjaga nilai strategis ekonomi Siprus selama abad ke-7. Sementara itu, Dikigoropoulos (1961) melalui kajian tesisnya menunjukkan adanya kesinambungan kehidupan perkotaan, pelabuhan, dan aktivitas ekonomi

di beberapa wilayah Siprus pada periode awal Islam.

Temuan-temuan arkeologi memperlihatkan bahwa meskipun terjadi perubahan politik, tidak terjadi kehancuran total terhadap struktur ekonomi pulau. Dengan demikian, sistem kondominium dapat dipahami sebagai bentuk kompromi politik yang secara ekonomi menguntungkan kedua pihak karena mempertahankan jalur perdagangan dan sumber pemasukan di kawasan Mediterania Timur. Selain itu banyak warga Arab yang pindah tidak menetap disana, kebanyakan dari mereka menjadi pembisnis, pedagang dikota-kota, pengusaha. Jarang sekali ditemukan Orang Arab yang menjadi petani, padahal Pulau Siprus adalah provinsi yang agraris. Dalam opini Dikigoropoulos (1961) "Jika saja penduduk Siprus tidak terlalu sering melanggar perjanjian maka ekonomi mereka akan tersokong oleh Kerjasama bisnis Siprus dengan Bizantium dan Arab".

### **Faktor-Faktor yang Mengakhiri Sistem Kondominium antara Dinasti Umayyah dan Imperium Bizantium di Siprus**

Seiring dengan bertambahnya beban internal Dinasti Umayyah di pusat pemerintahan Damaskus. Yang memimpin Kekhalifahan Islam selama hampir 1 abad lamanya. Yang memperluas ekspansi hingga ke kawasan Eropa. Siprus bukan lagi menjadi buffer zone. Perlahan namun pasti perjajian kondominium tidak efektif untuk kedua Imperium. Pulau tersebut direbut sepenuhnya oleh Kekaisaran Bizantium pada masa Dinasti Abbasiyah yang kemunduran administrative di Siprus pada masa akhir kekuasaan Dinasti Umayyah mulai terlihat. Berikut faktor yang mengakhiri sistem kondominium:

#### **1. Runtuhnya Dinasti Umayyah (Faktor Internal)**

Sebelum membahas peristiwa berakhirnya sistem kondominium, di jumpai masalah internal milik Kekhalifahan Islam. Dinasti Umayyah mengalami kemerosotan di dalam catur Kekhalifahan Islam sehingga kondominium belum sempat ikut runtuh Ketika pergantian kekhalifahan setidaknya ada 4 faktor penyebab runtuh-nya kekuasaan Umayyah yang dipaparkan oleh Uwais (1982):

- a. Pemberontakan tim oposisi yang kian banyak.
- b. Perselisihan Suku Mudhriyah dan Yamaniyah yang sulit dihapuskan.
- c. Terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala yang semakin menumbuhkan rasa benci terhadap Daulah Umayyah bagi mereka yang kontra terhadap pemerintahan Dinasti Umayyah seiring bertambah-nya kekuasaan Kekhalifahan Umayyah.
- d. Kefanatikan Bani Umayyah terhadap Bangsa Arab. Setelah Marwan II menjabat sebagai Khalifah dan mengalami kudeta oleh Abdullah As-Saffah. Dinasti Umayyah tidak lagi mengalami kepemimpinan. Suksesi digulirkan bergantian dengan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Dan menamakan dinastinya dengan Dinasti Abbasiyah. Namun meskipun otoritas Umayyah telah habis di wilayah timur, Dinasti Umayyah tetap hidup sampai abad ke sebelas berkat berhasilnya cucu Hisyam bin Abdul Malik yang melarikan diri ketika suksesi berlangsung. Kekuasaan Umayyah dikenal dengan nama kekhalifahan Cordoba dimulai dari Abdurrahman I cucu dari Hisyam Bin Abdul malik. Dan benar-benar runtuh pada tahun

1031 M.

Asumsi sementara, hal inilah yang menjadi indikasi besar berakhirnya sistem kondominium di Siprus. Sistem ini tidak mampu berjalan jika salah satu otoritas sedang mengalami tekanan didalam beban internalnya. Kemunduran Dinasti Umayyah merupakan faktor penting yang memengaruhi stabilitas wilayah-wilayah perbatasan, termasuk Siprus. Dinasti yang sebelumnya mampu memperluas wilayah hingga Afrika Utara dan Eropa ini mulai mengalami krisis internal pada akhir masa pemerintahannya. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kemunduran tersebut antara lain meningkatnya pemberontakan dari kelompok oposisi, konflik berkepanjangan antara suku Mudhriyah dan Yamaniyah, serta melemahnya legitimasi politik akibat berbagai kebijakan diskriminatif terhadap non-Arab (Uwais, 2020). Selain itu, peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala semakin memperkuat sentimen anti-Umayyah di kalangan masyarakat Muslim. Puncak keruntuhan terjadi ketika Marwan II mengalami kekalahan dalam Pertempuran Zab (750 M) oleh pasukan Abdullah As-Saffah (Blankinship, 1994). Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Umayyah di pusat pemerintahan dan digantikan oleh Dinasti Abbasiyah. Akibat dari runtuhnya kekuasaan pusat ini, kontrol terhadap wilayah-wilayah strategis seperti Siprus menjadi lemah. Pemerintahan Abbasiyah yang lebih fokus pada konsolidasi internal di wilayah timur tidak memberikan perhatian besar terhadap daerah perbatasan, sehingga keseimbangan kekuasaan yang sebelumnya menopang sistem kondominium mulai runtuh.

## 2. Pembelotan dan Pelanggaran terhadap Kesepakatan Kedua Imperium

Sistem kondominium antara Kekhalifahan Islam dan Kekaisaran Bizantium di Siprus pada dasarnya merupakan kompromi politik untuk menghindari konflik terbuka. Namun, dalam praktiknya, kesepakatan tersebut sering mengalami pelanggaran. Intensitas konflik militer yang tinggi di kawasan Mediterania Timur menyebabkan kedua pihak kerap melakukan serangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap wilayah Siprus. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap perjanjian bersama tidak sepenuhnya dijalankan. Seperti contoh kasus resistensi yang dilakukan adalah bukti meskipun tidak tepat di Pulau Siprus. Yakni penyerangan kapal Muslim yang dilakukan oleh Konstan II didekat pulau tersebut. Kemudian pembalasan kekhalifahan Umayyah sebagai bentuk balasan pelanggaran ratifikasi.

## 3. Ketidakjelasan Status Kondominium Kedua Imperium

Banyaknya serangan-serangan yang ada. Baik dari Bizantium dan Kekhalifahan Islam. menjadikan sistem kondominium Ambigu. Tidak ada penegasan ulang yang konsisten terkait status wilayah ini sebagai kepemilikan bersama menunjukkan bahwa perjanjian tersebut bersifat rapuh dan sering dilanggar. Dapat kita lihat konflik yang terjadi pada masa Abbasiyah dengan Bizantium. Kontak militer ini juga terjadi di kawasan Mediterania Timur pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masa-masa yang disebutkan Mediterania Timur juga berubah menjadi zona aktif konflik militer. Berkali-kali penyerangan dilakukan terhadap kapal-kapal dagang kedua kubu.

4. Agresi Militer yang Dilakukan oleh Kaisar Nikephorus II Phokas

Bizantium dan Islam adalah dua imperium yang berabad-abad lamanya berebut wilayah. Kedua dinasti tersebut sering melakukan baik itu kontak, militer, kontak diplomasi maupun kontak negosiasi. terkhusus untuk wilayah Siprus yang menjadi kesepakatan unik dan sangat jarang dijumpai didalam interaksi antar dua otoritas. Dimulai dari perjanjian 688 M sampai pada titik 965 M. Sistem toleransi Diplomatik (sistem kondominium) diakhiri dengan resistensi penuh oleh Nikephorus II Phokas. Beberapa kali Bizantium melakukan upaya pembebasan terhadap pulau Siprus dari orang-orang Arab, baik itu yang dilakukan Justinian, Nicephorus I bahkan Basil I dan Leo the wise. Resistensi selalu digagalkan dengan penyerangan ulang oleh Dinasti Abbasiyah. Sehingga pada September tahun 965 Nikephorus II Phokas yang terkenal dengan taktik militernya berhasil membebaskan Siprus dari tekanan Arab.

Faktor-faktor yang telah di paparkan. Merupakan manifestasi turun-nya kepercayaan antara dua kekuasaan. Meskipun sistem kondominium lahir pada masa Umayyad, keberlangsungannya tetap berlanjut pada masa Abbasiyah sehingga pembahasan mengenai akhir sistem tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik pasca-runtuhnya Umayyad, sistem kondominium pada masa Dinasti Umayyad diharuskan berlanjut sampai ke Abbasiyah sehingga kekuasaan yang berbeda tidak mampu menyangga ketahanan dua imperium dalam satu wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa analisa faktor runtuhnya sistem kondominium dalam sebuah catatan sejarah adalah dikarenakan Kekaisaran Bizantium dan Kekhalifahan Islam mempunyai indikasi kuat tidak bisa melakukan perdamaian atau berbagi otoritas. Baik itu dilatarbelakangi oleh histori kedua imperium, invasi wilayah ataupun penduduk lokal yang enggan mempunyai administrasi dua otoritas.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Sistem kondominium diterapkan dalam rangka kompromi politik antara Imperium Bizantium dengan Dinasti Umayyad setelah invasi yang dilakukan Mu'awiyah bin Abi Sufyan pada masa Khalifah Usman bin Affan dan disepakati oleh kedua belah otoritas pada masa Dinasti Umayyad lebih tepatnya perjanjian antara Justinian II dan Abdul Malik bin Marwan lewat jalur diplomasi. Secara politik implikasi diterapkannya sistem kondominium siprus adalah mempunyai otoritas ganda yang mewujudkan dalam manifestasi jizyah ganda kepada Bizantium dan Umayyad, netralitas kontak militer dan menjaga perlindungan penduduk. Sedangkan dalam aspek sosial Siprus mempunyai akulturasi budaya dan koeksistensi sosial. Dalam aspek keagamaan sendiri toleransi beragam tumbuh, tidak ada Islamisasi radikal maupun Kristenisasi radikal. Lalu dalam aspek ekonomi Siprus menjadi pusat perdagangan yang menguntungkan baik untuk Bizantium, Umayyad atau penduduk Siprus sendiri meski diharuskan membayar pajak atas kedua otoritas. Faktor berakhirnya sistem kondominium adalah beban internal di kekhalifahan, rawan pelanggaran atas kesepakatan, ketidakjelasan kompromi politik kondominium dan agresi militer oleh Kaisar Bizantium pada tahun 965 M.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akram, A. I. (2024). *Khalid bin Walid: Biografi pemimpin militer terbesar dalam sejarah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Baladhuri, A. b. Y. (1988). *Futuh Al-Buldan*. Dar wa Maktabatu Al-Hilal.
- Al-Bukhari. (1422 H). *Sahih al-Bukhari*. Dar Tawq al-Najah.
- Al-Mubarakfuri, S. R. (2008). *Sirah Nabawiyah (Ar-Rahiq al-Makhtum)* (K. Suhardi, Penerjemah). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Usyairi, A. (2006). *Sejarah Islam sejak zaman Nabi hingga abad XX*. Akbar Media.
- Amrulloh, M. A. (2017). Analisis perubahan fonologis dalam bentuk kalimah mu'arrabah. *Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban*, 4(2).
- Arsuaga, S. (2018). *The Pheasant Island: A threshold in time* [Makalah konferensi]. Eurau 18 Alicante retroactive research, Architecture Department, Stockholm, Swedia.
- Ashara, W. Q. (2021). *Sejarah Arabisasi dan dampak sosiokultural di masa Dinasti Umayyah (661-750 M)* [Skripsi sarjana, IAIN Purwokerto].
- Ahmad, A., Ahmad, I., Shah, M. W. S. M., Ahmad, S. A., & Rehman, A. U. (2024). Government and politics in early Islamic history: The evaluation of Sayyiduna Hazrat Ameer Muawiya (RA) administration and architecture. *Migration Letters*, 2(S3).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses 7 Mei 2026.
- Blankinship, K. Y. (1994). *The end of the jihad state*. SUNY Press.
- Burkiewicz, L. (2021). "Inde Insulam Cyprum Inter Graecos Et Sarraticos (Sarracenos)..." Cyprus in 724 AD as seen by the English Monk Willibald. *Perspektywy Kultury*, (33).
- Cameron, A. (2012). *The Mediterranean world in late antiquity, AD 395–700*. Routledge.
- Dikigoropoulos, A. I. (1961). *Cyprus 'betwixt greeks and saracens' A.D. 647-965* [Tesis doktor, Lincoln College Oxford].
- Donner, F. M. (1981). *The early Islamic conquests*. Princeton University Press.
- Febrianti, A., Andjani, A. K., Farhandani, M. R., & Ramli, S. (2024). Sejarah Islam masa Dinasti Umayyah: Berdirinya, pola pemerintahan, ekspansi wilayah, dan peradaban Islam. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, 8(12).
- Hill, G. (1940). *A history of Cyprus* (Vol. 1). Cambridge University Press.
- Hitti, P. K. (1970). *History of the Arabs*. Macmillan.
- Ibn Katsir, A. F. I. b. U. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Darut Toyyibah.
- Jacobs, A. S., & Vryonis, S. (2016). *Epiphanius of Cyprus: A cultural biography of late antiquity*. University of California Press.
- Kennedy, H. (2007). *The great Arab conquests: How the spread of Islam changed the world we live in*. Da Capo Press.
- Mosses, M. (2021). *Vanuatu legal systems of the Pacific*. Intersentia.
- Nazir, M. (2003). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Oppenheim, L. (1905). *International law: A treatise* (Vol. I, Peace). Longmans, Green, and Co.

**Analysis of the Implications of the Condominium System in Cyprus: Diplomatic Strategies in Islamic Expansion during the Umayyah Dynasty**

Muhammad Huda Tibbil Qulub

- Ozturk, M. (2021). Hz. Osmân (23-35/644-656) döneminde denizcilik faâliyetleri. *Journal of Humanities and Social Sciences*, (18).
- Ozturk, M. (2022). Cyprus (28-353 AH/648-965 AD): An island unable to be shared between the Byzantine Empire and the Islamic Caliphate. *Sarkiyat Mecmuasi-Journal of Oriental Studies*, (41).
- Rifat, M. (2014). Dakwah dan toleransi umat beragama (Dakwah berbasis rahmatan lil ‘alamin). *Al Hadlrah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 13(26).
- Shaw, M. N. (2017). *International law* (8th ed.). Cambridge University Press.
- Theophanes, & Confessor. (1997). *The chronicle of Theophanes Confessor* (C. Mango & R. Scott, Penerjemah). Clarendon Press.
- Uwais, A. H. (2020). *Belajar dari runtuhnya daulah-daulah Islamiyah* (I. Mukhtar, Penerjemah). Pustaka Al-Kautsar. (Karya asli diterbitkan 1982).
- Vasiliev, A. A. (1953). *History of the Byzantine Empire 324-1453*. The University of Wisconsin Press.
- Yatim, B. (2013). *Sejarah peradaban Islam*. Rajawali Pers.
- Zavagno, L. (2017). *Cyprus between late antiquity and the early middle ages (ca. 600–800): An island in transition*. Routledge.